



Perkembangan dan Peran Nederlands Koloniaal Bestuur dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Hindia-Belanda Awal Abad XX

Purwanto Putra

Prodi D3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung.

Korespondensi: purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Diajukan: 16-08-2024; Direvisi: 15-11-2024; Diterima: 18-11-2024

Abstract

This article examines the role of the government in managing libraries in the Dutch East Indies and the development of libraries from 1887 to 1914. The main focus is on official reports and related data from that period, including library management, public interest in library services, and the evolution of these services in a colonial context. The goal of writing the history of library management in the Dutch East Indies is to offer a deeper understanding of the root causes, the development of information services, and the government's role in shaping literacy in the past. This research uses a historical method based on various primary sources from digital databases, collected between July and August 2024. The methodology includes topic selection, source collection and verification, data interpretation, and historiography, ensuring a systematic approach based on credible sources. Primary sources come from the Delpher database and the digital collections of Leiden University. Delpher was used to explore Dutch newspapers, books, and magazines, while Leiden's digital archives provided relevant documents. The findings show that while the government of the Dutch East Indies was involved in library management, its support was mainly limited to administrative oversight and basic regulation. Challenges included inadequate funding and a lack of trained librarians, which affected the quality of services and collection management. A significant disparity in support for libraries between the Netherlands and the Dutch East Indies was evident in the early 20th century.

Keywords: Libraries in the Indies; Colonial Libraries; Dutch East Indies Libraries

Abstrak

Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda serta perkembangan perpustakaan dari tahun 1887 hingga 1914. Fokus utama artikel ini dari laporan resmi dan data terkait pada periode tersebut, mencakup pengelolaan perpustakaan, minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan, serta evolusi layanan perpustakaan dalam konteks kolonial. Tujuan ditulisnya sejarah pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda ini diharapkan dapat membantu untuk memahami secara mendalam tentang akar permasalahan, perkembangan layanan informasi, dan peran pemerintah dalam membentuk kecakapan literasi di masa lalu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dari berbagai sumber primer yang berasal dari basis data digital. Data dikumpulkan dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2024. Metode penelitian mencakup pemilihan topik, pengumpulan dan verifikasi sumber, interpretasi data, dan historiografi. Proses ini untuk memastikan pendekatan sistematis berbasis sumber yang kredibel, guna menghasilkan pemahaman mendalam tentang peran pemerintah, perkembangan, dan tantangan dalam pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda. Sumber utama penelitian berasal dari basis data Delpher dan koleksi digital Universitas Leiden. Basis data Delpher digunakan untuk menelusuri koran, buku, dan majalah Belanda, sedangkan koleksi digital Universitas Leiden untuk arsip-arsip relevan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Hindia Belanda memiliki peran dalam pengelolaan perpustakaan, meskipun begitu dukungan mereka umumnya terbatas terkait urusan pengawasan administratif dan pengaturan dasar. Penyelenggaraan perpustakaan di Hindia Belanda menghadapi tantangan khususnya terkait pendanaan dan kurangnya pustakawan terlatih, hal ini berdampak pada kualitas layanan dan pengelolaan koleksi. Ada perbedaan mencolok dukungan terhadap perpustakaan di Belanda dan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20.

Kata Kunci: Bibliotheken in Indië; Perpustakaan Kolonia; Perpustakaan Hindia Belanda

Pendahuluan

Institusi perpustakaan sudah sejak lama dianggap sebagai pilar utama dalam penyebaran pengetahuan dan pendidikan dalam masyarakat. Dalam lintasan sejarah perpustakaan masa Hindia Belanda, menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 peran perpustakaan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memajukan pendidikan dan budaya di wilayah kolonial. Meskipun banyak usaha telah dilakukan untuk mendirikan dan mengelola perpustakaan, masih terdapat banyak laporan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan di Hindia Belanda. Artikel ini berfokus menganalisis pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda antara tahun 1887 hingga 1914, tujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan organisasi mendukung pengembangan perpustakaan serta berbagai tantangan yang dihadapinya.

Selama periode tersebut, perpustakaan di Hindia Belanda menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya minat dan keterlibatan masyarakat, hal ini juga merupakan tantangan yang terjadi di Belanda dan daerah timur lainnya ketika itu. Laporan-laporan seperti yang dikutip dalam tulisan G.V. Amrt menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya optimalisasi, keadaan perpustakaan secara umum tidak mengalami perubahan signifikan menuju perbaikan. Menurut Regeerings almanak voor nederlandsch-indie untuk Hindia Belanda tahun 1909, di seluruh Hindia Belanda terdapat delapan perpustakaan yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Buitenzorg (Bogor), Bandung, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ternate. Namun, dari delapan perpustakaan ini, hanya lima yang memiliki pustakawan tetap, sementara yang lainnya hanya memiliki dewan pengurus tanpa pengelolaan yang terstruktur (Dutch East Indies, 1909).

Pendirian dan dukungan terhadap perpustakaan Belanda di Hindia Belanda merupakan bagian integral dari program Kelompok Nederlandsch-Indië yang merupakan bagian dari Algemeen Nederlandsch Verbond (Heldt, B.H., 2012). Kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung visi Verbond dalam memajukan pendidikan dan budaya di wilayah kolonial. Berdasarkan Statuten der Groep Nederlandsch-Indië, kelompok ini bertanggung jawab untuk mendirikan dan mendukung perpustakaan, serta mempromosikan pengetahuan bahasa Belanda bagi kalangan penduduk Indo-Eropa dan masyarakat pribumi. Selain itu, kelompok ini berusaha membangkitkan minat terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan sastra Belanda, serta mendukung pendidikan anak muda Indo-Eropa atau Eropa di lembaga pendidikan Belanda.

Meskipun terdapat berbagai upaya dari pemerintah dan organisasi untuk memperbaiki dan mengelola perpustakaan, hal ini tidak menjadikan luput dari berbagai persoalan. Perpustakaan yang pernah berdiri di Buitenzorg, misalnya, pernah eksis perpustakaan rakyat yang dikelola oleh Lodge "Excelsior" yang berjalan selama sekitar 14 tahun, namun perpustakaan ini hanya buka dua kali seminggu dan tidak memiliki ruang baca. Masalah ini mungkin terkait dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan. Kemudian, di Bandung, berdiri sebuah perpustakaan yang dibuka sejak 16 Oktober 1891 dengan koleksi awal sebanyak 250 buku dan berkembang hingga memiliki koleksi hampir mencapai 3.000 buku. Namun, perpustakaan ini sangat bergantung pada sumbangan masyarakat untuk menambah koleksi dan mempertahankan operasionalnya. Di Semarang, ada perpustakaan "De Bruyn Kops" yang awalnya didirikan di Batavia kemudian dipindahkan ke Semarang dan dikelola oleh HBS dengan koleksi sekitar 5.000 buku. Kemudian, di Malang, terdapat tiga jenis perpustakaan militer, rakyat, dan pertanian yang semuanya berada di dalam kompleks "Militair Tehuis".

Perpustakaan ketika itu telah memainkan peran penting dalam upaya penyebaran pengetahuan dan pendidikan bagi berbagai masyarakat. Di Hindia Belanda, pengelolaan perpustakaan dan perkembangan fasilitas ini menjadi perhatian utama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keberadaan dan pengelolaan perpustakaan menunjukkan pentingnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam memajukan akses dan pemanfaatan perpustakaan. Satu hal yang perlu

digarisbawahi terkait tantangan kurangnya minat masyarakat dan pengelolaan yang terbatas terus menjadi isu yang mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama: (1) Apa peran pemerintah dalam pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda?; (2) Bagaimana perkembangan perpustakaan di Hindia Belanda dari tahun 1887 hingga 1914? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memahami dinamika pengelolaan perpustakaan dan tantangan yang dihadapi dalam usaha penyebaran pengetahuan dan budaya di Hindia Belanda. Dengan menganalisis peran pemerintah serta perkembangan perpustakaan selama periode tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi dan kendala peningkatan akses informasi dan pendidikan di wilayah Hindia Belanda.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan Perpustakaan Masa Kolonialisme

Clayton dan Gorman (2001), menyampaikan bahwa untuk mengelola perpustakaan secara efektif, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna serta bagaimana koleksi perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, perpustakaan yang tidak diperbarui dan kurang menarik bagi pengguna cenderung kehilangan relevansi dan mengalami penurunan nilai (Clayton, P., & Gorman, G. E., 2001). Keberadaan perpustakaan di masa kolonialisme, dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari fasilitas pendidikan, memainkan peran penting sebagai "alat pencerahan" yang tujuannya untuk menyebarkan pengetahuan dan budaya kepada masyarakat umum (Wayne Bivens-Tatum, 2012). Sebagai institusi yang mengelola materi pendidikan dan akses ke informasi, perpustakaan diharapkan mampu memperluas wawasan pengetahuan dan memperdalam pemahaman budaya masyarakat. Meskipun memiliki peran sangat positif, penting untuk menyadari bahwa fungsi perpustakaan dalam konteks masyarakat kolonial seringkali memiliki dimensi yang jauh lebih rumit.

Sejalan dengan pernyataan Wayne, Mutonga & Okune, (2022) mempertegas hal tersebut dengan menyatakan, meskipun perpustakaan pada masa kolonialisme berperan untuk menyebarkan "pengetahuan dan budaya" hal itu tampak sebagai suatu tujuan mulia, tapi penting untuk kita sadari bahwa di sisi lain aspek dari kolonialisme juga berpotensi menghancurkan pengetahuan lokal, menekan pengetahuan, bahasa, dan tradisi budaya yang ditemuinya untuk menggantikannya, perpustakaan juga turut memainkan peran (Mutonga & Okune, 2022). Beberapa tahun lalu Chiu, Ettarh and Ferretti, (2021) menyebut bahwa *Colonialism was so detrimental to cultures with oral traditions* (CILIP London, 2020), *that the worship of the written word can be seen as a characteristic of white supremacy* (Chiu dkk., 2021), bahwa kolonialisme pada dasarnya akan sangat merugikan budaya dengan berbagai tradisi lisan, yang akan digantikan dengan meninggikan kata-kata dalam ekspresi tertulis yang sekaligus dapat dianggap sebagai ciri dari supremasi masyarakat kulit putih.

Kolonialisme yang merusak budaya lisan sering kali memprioritaskan tulisan sebagai bentuk pengetahuan yang sah dan superior, yang berkontribusi pada penguatan supremasi kulit putih. Dalam konteks perpustakaan pada masa kolonial, hal ini terlihat jelas. Perpustakaan sering dijadikan alat untuk mendominasi dan menggantikan tradisi lisan dengan sistem pengetahuan tertulis yang dianggap lebih "beradab" atau "unggul." Bahwa kita juga boleh curiga ketika yang diutamakan materi tertulis maka pada satu sisi akan mengabaikan atau menekan bentuk pengetahuan lain, perpustakaan kolonial tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan hierarki budaya dan kekuasaan kolonial. Keadaan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa pengetahuan tertulis adalah satu-satunya bentuk pengetahuan yang valid, sambil meremehkan dan menghilangkan nilai-nilai dari tradisi lisan yang ada di masyarakat yang dijajah.

Dalam karya yang lain Gorman & Clayton (2005), *The Role of the Library in the 21st Century: Past, Present, and Future* juga memberikan analisis mendalam mengenai perkembangan peran perpustakaan dari waktu ke waktu (Gorman, G. E., & Clayton, P., 2005). Misalnya dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi bahwa telah berlangsung suatu evolusi signifikan, dalam dua dekade terakhir, terkait adaptasi perpustakaan dalam mendukung berbagai inovasi teknologi dan paradigma pengajaran atau model pembelajaran yang lebih baru. Satu tulisan, dari ODonnell, P., & Anderson, L. (2021) membahas bagaimana transformasi perpustakaan, secara mendalam berupaya menggali terkait konteks sejarah, menyoroti perkembangan global sejak awal 1990-an yang ternyata telah membentuk peran progresif dan peningkatan urgensi atau peran penting perpustakaan universitas dalam lingkungan akademik (ODonnell & Anderson, 2022).

Berbagai karya di atas sangat penting untuk melihat bagaimana perkembangan perpustakaan di Indonesia ke depan, yang bermula dari masa Hindia Belanda atau malah kerajaan-kerajaan Nusantara. Melalui kajian ini dengan didukung karya Gorman dan Clayton juga Kranich ini kita bisa memotret seperti apa perubahan dalam hal pengorganisasian, layanan atau koleksi perpustakaan agar tetap relevan mulai dari masa Hindia Belanda hingga Indonesia hari ini.

Pendirian dan Penyelenggaraan Perpustakaan di Hindia Belanda

Mengenai pendirian dan penyelenggaraan perpustakaan termasuk juga dukungan terhadap perpustakaan Belanda di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, bahwa perpustakaan berperan krusial dalam upaya memajukan pendidikan dan budaya di wilayah koloni dengan menyediakan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun, seringkali terdapat keluhan mengenai rendahnya minat dan keterlibatan masyarakat terhadap perpustakaan di Hindia Belanda, yang mencerminkan tantangan serupa di Belanda. Ini mencerminkan kondisi umum perpustakaan di berbagai daerah di Timur, di mana banyak perpustakaan menghadapi masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kondisinya tentu terus berkembang misalnya sebuah penelitian tentang perpustakaan di Korea, yang dilakukan oleh Changhee Kim, Hyunjung Kim, dan Kanghwa Choi (2020) berjudul, *Efficiency Analysis of Public Library Services Based on Establishing Entity and Outsourcing* yang menjelaskan bahwa perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah daerah lebih efisien dibandingkan yang didirikan oleh pemerintah pusat, dan *outsourcing* meningkatkan efisiensi perpustakaan (Kim et al., 2020). Jika dikaji ternyata ada perbedaan terkait efisiensi antara perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pihak swasta secara *outsourcing*.

Penelitian lain dari Gunapala, M., Montague, A., Reynolds, S., & Vo-Tran, H. (2020) berjudul, *Managing Change in University Libraries in the 21st Century: An Australian Perspective*, menyebutkan kondisi modern seperti sekarang dalam pendirian dan penyelenggaraan perpustakaan dibutuhkan suatu kerangka konseptual guna untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi sumber daya, relevansi, pemangku kepentingan, strategi, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur sebagai elemen penting dalam mengelola perubahan di perpustakaan, dalam konteks penelitian ini khususnya untuk perpustakaan-perpustakaan universitas sektor publik di wilayah Australia (Gunapala et al., 2020). Hasil ini bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah pendirian dan penyelenggaraan perpustakaan di Hindia Belanda akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga telah menerapkan kerangka konseptual sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Gunapala dan rekan-rekan.

Pendirian dan pemeliharaan perpustakaan di Hindia Belanda, dikenal sebagai "Stichting en begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Indië," yang masuk dalam program dan tujuan utama dari Kelompok Nederlandsch-Indië di bawah Algemeen Nederlandsch Verbond, sebagaimana juga telah diatur dalam anggaran dasar kelompok tersebut. Kelompok ini bertujuan untuk mendukung misi Verbond, seperti diuraikan dalam pasal 2 dan 3 anggaran dasar yang disahkan oleh Keputusan Kerajaan tanggal 13 Juni 1898 No. 55 Ned. Stsbl. dan ketentuan lebih lanjut tahun 1901 Ned. Stsbl.

Ketentuan ini berlaku untuk kelompok dan anggotanya, selama tidak melanggar ketentuan dalam pasal-pasal berikut. Selain mendirikan perpustakaan, tujuan lainnya termasuk: (1) memajukan masyarakat Hindia Belanda sesuai dengan karakter Belanda; (2) meningkatkan penguasaan bahasa Belanda di kalangan penduduk Indo-Eropa dan masyarakat pribumi; (3) merangsang minat terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan sastra Belanda, terutama tulisan ilmiah praktis; (4) mendorong pendidikan anak muda Indo-Eropa atau Eropa di lembaga pendidikan Belanda; (5) memberikan bantuan dan rekomendasi; dan (6) menerbitkan serta menyebarkan berbagai tulisan yang berguna (Statuten der Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 1901).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber primer dari berbagai basis data digital untuk kedalaman dan keakuratan analisis. Dalam penelitian ini penggunaan sumber primer sangat penting dalam pengembangan dan merekonstruksi sejarah yang kritis yang autentik (Orna Farrell & James Brunton, 2016) dan penggunaan sumber primer yang telah didigitalkan (Tally & Goldenberg, 2005). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian tentang Perpustakaan di Hindia Belanda ini bersumber dari basis data Delpher dan Koleksi Digital Universitas Leiden. Delpher sebagai *platform* yang memungkinkan penulis untuk melakukan pencarian teks-teks sejarah secara detail dari koran, buku, dan majalah Belanda. Dengan Delpher dan repositori Perpustakaan Universitas Leiden, peneliti dapat mengakses berbagai dokumen terkait sejarah penyelenggaraan perpustakaan di Hindia Belanda, awal abad ke-20. Pengumpulan data, dokumen, dan arsip dilakukan sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus tahun 2024. Keterbatasan, ada beberapa materi dokumen dan arsip yang sangat relevan dengan topik penelitian, namun tidak bisa diakses karena masih dibatasi oleh hak cipta dan prasyarat akses secara fisik.

Langkah-langkah dari penulisan artikel ini, yaitu pertama pemilihan topik, di mana topik yang akan dibahas ditentukan berdasarkan relevansi dan potensi kontribusinya terhadap pemahaman sejarah perpustakaan di Hindia Belanda. Setelah topik ditetapkan, proses heuristik dilakukan untuk mengumpulkan sumber. Dalam tahap ini, kriteria pengumpulan dan pemilihan sumber mencakup keaslian dokumen, konteks penerbitannya, dan hubungan langsungnya dengan topik penelitian. Selanjutnya, tahap verifikasi atau kritik sumber dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas dokumen yang diperoleh. Teknik validasi sumber primer melibatkan analisis asal-usul dokumen, identifikasi bias penulis, dan perbandingan silang dengan sumber lain untuk memastikan konsistensi informasi. Perincian ini tidak hanya meningkatkan transparansi metode yang diterapkan tetapi juga memberikan dasar kuat untuk menjustifikasi keakuratan dan relevansi sumber yang digunakan.

Setelah sumber diverifikasi, tahap interpretasi dilakukan, peneliti menafsirkan informasi untuk memahami konteks dan makna dokumen dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Tahap akhir dari metode ini adalah historiografi, di mana hasil interpretasi disusun dalam bentuk penulisan sejarah yang koheren dan akurat tentang Perpustakaan di Hindia Belanda, khususnya terkait peran Pemerintah Hindia Belanda, perkembangan dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perpustakaan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan catatan Regeerlings almanak Hindia Belanda tahun 1909, bagian kedua, halaman 486, berdiri delapan perpustakaan tersebar di seluruh Hindia Timur. Daftar ini mencakup perpustakaan yang terletak di kota utama seperti Buitenzorg, Bandung, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ternate. Keberadaan perpustakaan-perpustakaan ini merupakan upaya sistematis untuk menyediakan akses pengetahuan dan pendidikan di wilayah kolonial tersebut,

meskipun tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sering kali menghambat efisiensi dan perkembangan mereka.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Perpustakaan di Hindia Belanda

Keberadaan perpustakaan di masa kolonialisme dapat dikatakan sebagai sebuah institusi, sejalan yang disampaikan (Biven-Tatums, 2012) menjalan peran untuk menyediakan akses informasi dan sumber daya pendidikan, perpustakaan pada masa tersebut juga diharapkan agar dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan meningkatkan pemahaman budaya di kalangan masyarakat. Namun, meskipun tujuan ini tampak mulia, perlu dicatat bahwa peran perpustakaan dalam konteks kolonial seringkali lebih kompleks dari sekedar tujuan tersebut. Dalam banyak kasus, perpustakaan tidak hanya menyebarkan pengetahuan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru yang bahkan disadari atau tidak dapat menggantikan budaya lokal. Oleh karena itu, meskipun perpustakaan berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan informasi, perpustakaan juga terlibat dalam proses yang lebih luas dari transformasi budaya dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kolonial.

Pemerintah Hindia Belanda dalam praktiknya memang memiliki peran penting dalam pengelolaan perpustakaan, namun sering kali terbatas pada pengawasan administratif dan pengaturan dasar. Menurut *Statuten der Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond*, kelompok ini dibentuk dengan tujuan mendukung berbagai inisiatif di Hindia Belanda, termasuk pendirian dan dukungan perpustakaan Belanda di wilayah tersebut. Berdasarkan artikel 1 dan 2 dari statuten tersebut, kelompok ini memiliki misi untuk mendorong kemajuan, terutama dalam hal peradaban Eropa dan pengembangan pengetahuan di Hindia Belanda. Dalam konteks ini, dukungan terhadap perpustakaan menjadi salah satu fokus penting. Artikel 2 menyebutkan beberapa inisiatif yang termasuk dalam misi kelompok ini, antara lain meningkatkan pengetahuan bahasa Belanda di kalangan penduduk Indo-Eropa dan masyarakat lokal, serta mempromosikan seni, ilmu pengetahuan, dan sastra Belanda.

Pendirian dan dukungan terhadap perpustakaan di Hindia Belanda merupakan bagian integral dari upaya ini, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas sumber daya informasi bagi masyarakat. Statuten tersebut juga mengatur tentang struktur organisasi kelompok, termasuk pengelolaan dan administrasi perpustakaan yang didirikan. Art.3 hingga Art.16 menetapkan aturan tentang pengelolaan keuangan, pemilihan anggota, dan pengaturan administrasi kelompok. Kelompok ini, yang didirikan pada tahun 1900 dan berpusat di Batavia, memiliki struktur organisasi yang mengatur berbagai aspek pengelolaan perpustakaan dan inisiatif lainnya.

Dengan bersandar dari berbagai pernyataan Wayne dan Chiu dkk, Mutonga dan Okune yang mengulas tentang peran konteks perpustakaan dan kolonialisme di wilayah Afrika yang menyatakan bahwa keberadaan berbagai perpustakaan pada masa kolonialisme, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyebaran pengetahuan dan budaya, tetapi juga berperan dalam mendominasi dan menggantikan tradisi lisan dengan pengetahuan tertulis, memperkuat supremasi kulit putih dan hierarki kekuasaan kolonial. Untuk berbagai wilyah di Hindia Belanda dan Asia, ada juga kajian sejenis dari Fitzpatrick (2008), yang menjelaskan bahwa dari berbagai bukti bahwa ada institusi yang secara sentral menjalankan peran sebagai perpustakaan pinjam-meminjam khususnya pada masa Kolonial Belanda, yaitu Balai-Poestaka (Balai Pustaka), yang ketika itu dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda, lembaga ini ternyata memainkan dua peran sekaligus yaitu sebagai sebuah penerbitan untuk berbagai sumber pustaka dan menjalankan fungsi sebagaimana layaknya perpustakaan umum.

Lebih lanjut, Fitzpatrick menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan lain dari keberadaan Balai Pustaka tersebut, baik itu disadari atau tidak setidaknya ada tiga peran yang dilakukan, yaitu: *pertama*, untuk menghasilkan tenaga kerja yang melek huruf untuk industri manufaktur; *kedua*, untuk

mengurangi minat masyarakat pada berbagai pertunjukan atau cerita tradisional yang dalam pementasannya kadang-kadang menyindir kekuasaan Belanda. Dan, *ketiga* keberadaan sumber pustaka yang diterbitkan dan koleksi-koleksi perpustakaan untuk tujuan mengajarkan nilai-nilai "yang benar" kepada penduduk lokal: terkait penerimaan terhadap kekuasaan Belanda, kebersihan, ketergantungan, efisiensi, ketepatan waktu, dan konsumsi barang. Misalnya saja itu terdapat pada berbagai karya sastra atau novel-novel yang isinya memuat konten yang secara sengaja merusak tradisi dan untuk membimbing para pembaca atau pemustaka untuk menjadi konsumen dari pola-pola industri yang dicanangkan dalam rezim kolonial (Elizabeth B. Fitzpatrick, 2008).

Perkembangan dan Tantangan Pengelolaan Perpustakaan di Hindia Belanda (1887-1914)

Perkembangan perpustakaan di Hindia Belanda selama periode ini mencerminkan pertumbuhan dan tantangan dalam penyediaan layanan perpustakaan. Menurut Almanak Pemerintah Hindia Belanda tahun 1909, terdapat delapan perpustakaan di seluruh Hindia Timur yang tersebar di Buitenzorg, Bandung, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ternate. Di dalam praktiknya, delapan perpustakaan ini meskipun tersebar di berbagai lokasi, kenyataannya menghadapi tantangan dan persoalan serupa dalam hal pengelolaan dan perkembangan yaitu dukungan finansial baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga berdampak dalam hal layanan. Pengelolaan perpustakaan-perpustakaan tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat lokal dan organisasi swasta. Dari laporan tersebut, juga terlihat bahwa perpustakaan-perpustakaan ini umumnya memiliki dewan pengurus, tetapi hanya lima di antaranya yang memiliki tenaga pustakawan tetap. Keseluruhan perpustakaan tersebut berjalan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Kendati demikian salah satu contoh untuk perpustakaan yang berada di di Buitenzorg secara koordinatif berada di bawah pengawasan pejabat di Buitenzorg, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk mengatur dan memantau fasilitas perpustakaan meskipun keterlibatan dan perannya sangat terbatas dalam hal pengembangan perpustakaan.

Kesulitan dalam memperoleh dana yang memadai dan kekurangan tenaga ahli yang terlatih merupakan isu utama yang mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan di Hindia Belanda. Pendanaan yang tidak mencukupi sering kali membatasi kemampuan perpustakaan untuk memperbarui koleksi buku, memperbaiki fasilitas, dan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, kekurangan tenaga ahli yang terlatih menyulitkan pengelolaan perpustakaan dengan efektif, karena staf yang kurang terampil mungkin tidak dapat mengelola koleksi secara maksimal dan untuk memberikan layanan yang memadai.

Selain itu, perpustakaan-perpustakaan tersebut juga mengalami kendala dalam hal koleksi dan penyebaran informasi. Koleksi buku yang tersedia sering kali terbatas dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan lokal, yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang berkualitas. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan perpustakaan dimasa tersebut juga belum berlangsung secara optimal, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam berbagai fasilitas, layanan dan program yang diberikan. Akibatnya, keterbatasan dalam memberikan layanan perpustakaan, menjadi tantangan dan menghambat perpustakaan untuk menjadi pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat.

Sebelum secara detail dijelaskan ada beberapa contoh layanan yang dapat diungkapkan, misalnya, perpustakaan di Buitenzorg dikelola oleh Lodge "Excelsior" dan hanya menyediakan layanan peminjaman buku tanpa ruang baca, sementara perpustakaan di Bandung yang didirikan pada tahun 1891 juga mengandalkan sumbangan buku dari masyarakat. Sementara itu, perpustakaan di Semarang, yang awalnya didirikan di Batavia, berkembang dengan koleksi buku yang cukup luas mencakup berbagai bidang ilmu. Di Malang, terdapat beberapa perpustakaan dengan fokus berbeda, seperti perpustakaan militer dan perpustakaan pertanian. Semua perpustakaan ini dapat dikatakan

menjalankan fungsinya secara swadaya dan bergantung kedermawanan atau sumbangan masyarakat dan bahkan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

Sedangkan kondisi yang berbeda dengan di Hindia Belanda, berlangsung pada perpustakaan-perpustakaan mulai awal abad ke-20, terkait sistem dan penyelenggaraan perpustakaan di Belanda. Ada berbagai perubahan penting dan signifikan di sana dengan pembentukan Persatuan Ruang Baca Umum yang mulai diperbincangkan mulai tahun 1908. Inisiatif ini diprakarsai oleh Dr. D. Bos, ketua pengurus, yang menginginkan peningkatan kerjasama antar lembaga perpustakaan dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Persatuan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang manajemen perpustakaan, mempermudah pertukaran buku, dan mempromosikan kebijakan publik terkait perpustakaan. Dr. Bos bersama dengan Dr. H. E. Greve, yang memberikan pra-saran mengenai dukungan pemerintah terhadap perpustakaan, memainkan peran kunci dalam inisiatif ini. Pada rapat tahunan pertama yang diadakan di Muis Sacrum, Arnhem, berbagai kegiatan seperti kursus pelatihan dan penerbitan brosur tentang perpustakaan diumumkan. Persatuan juga merencanakan penerbitan majalah "de Boekzaal" dan menetapkan anggaran untuk tahun 1909 (*Abnhemsche Courant*, 1909).

Di Belanda, perhatian terhadap perpustakaan semakin meningkat dengan dorongan untuk mendapatkan dukungan negara yang lebih besar. Dalam pembicaraan tersebut, Dr. Greve menyoroti dua pendekatan utama untuk dukungan perpustakaan: dukungan langsung berupa subsidi kepada perpustakaan kecil dan dukungan tidak langsung melalui informasi dan manajemen. Dr. Greve juga membahas perbandingan antara praktik di negara-negara Jerman-Romawi dan Anglo-Saxon serta peran pemerintah dalam menyediakan pinjaman dan subsidi. Sementara itu, pembicara seperti Mr. G. van der Flier, Tuan Hirst, dan Tuan Robbers mendukung pengembangan bebas ruang baca dan campur tangan pemerintah yang lebih besar. Rapat tersebut menekankan pentingnya dukungan kota dan keterlibatan pemerintah dalam mempromosikan dan mendukung perpustakaan.

Jika dibandingkan dengan kondisi perpustakaan di Hindia Belanda pada periode yang sama, situasinya cukup berbeda. Di Hindia Belanda, upaya untuk mendirikan dan mengelola perpustakaan sering kali menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan dukungan institusi. Perpustakaan di Hindia Belanda umumnya lebih bergantung pada inisiatif lokal dan kurang mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah kolonial. Berbeda dengan Belanda yang sedang mendorong pembentukan dan pengelolaan perpustakaan dengan dukungan negara, Hindia Belanda belum mengalami perkembangan serupa. Hal ini mencerminkan perbedaan prioritas dan sumber daya antara pusat kekuasaan kolonial di Belanda dan wilayah jajahan di Hindia Belanda, di mana dukungan pemerintah terhadap perpustakaan cenderung lebih terbatas dan perpustakaan beroperasi dengan sumber daya yang terbatas.

Selain itu partisipasi publik di Belanda juga boleh dikatakan sangat besar dan aktif, salah satunya terdokumentasi dari artikel yang dimuat dalam surat kabar, yang memberitakan tentang Kongres Serikat Buruh R. K. Belanda yang diadakan pada Minggu, 14 Juni 1908 di Utrecht. Dalam rapat itu para pengurus "Federatie" membahas tentang pentingnya memasukkan bacaan sosial ke dalam perpustakaan dan meja bacaan di semua asosiasi militer R. K., serta meminta Pengurus Pusat Limb. R. K. *Volksbond* untuk bertindak sesuai dengan hal ini. Hasilnya bahwa pengurus "Federatie" mendukung keputusan tersebut dengan memutuskan untuk mengirimkan surat kepada semua pengurus asosiasi militer R. K., dan bahkan mendesak agar mereka melaksanakan keputusan tersebut dan menawarkan pengiriman gratis beberapa eksemplar publikasi sosial. Selain itu, mereka meminta cabang-cabang "Federatie" untuk menyuplai buku atau brosur sosial kepada asosiasi militer R. K. yang membutuhkan (*Nieuwe Tilburgsche Courant Tilburgsch Dagblad*, 1908).

Secara lebih detail berdasarkan sumber primer *Regeerlingsalmanak*, dijelaskan mengenai beberapa perpustakaan yang ada di Hindia Belanda, awal abad ke-20 sebagai berikut:

Perpustakaan di Buitenzorg

Perpustakaan rakyat di Buitenzorg didirikan dan dikelola oleh Lodge "Excelsior." Perpustakaan ini telah beroperasi selama sekitar 14 tahun dengan koleksi sekitar 3.000 buku. Meskipun perpustakaan ini tidak memiliki ruang baca, fasilitas peminjaman buku tersedia dua kali seminggu: pada Rabu sore dari pukul 16:00 hingga 18:00, dan Minggu pagi dari pukul 07:00 hingga 09:00. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan ini sebagian besar diperoleh melalui sumbangan atau pembelian di lelang tahunan. Sangat disayangkan bahwa perpustakaan ini belum tercantum di rubrik yang sesuai dalam almanak pemerintah setempat, dan malah dikelompokkan di bagian pengantar amal. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya keberadaan perpustakaan sebagai sarana pendidikan dan literasi masyarakat. Diharapkan, dalam edisi berikutnya, perpustakaan ini akan ditempatkan pada rubrik yang lebih tepat, disertai dengan deskripsi singkat tentang koleksi buku, jam buka, dan aspek-aspek penting lainnya. Selain Perpustakaan "Excelsior," Buitenzorg juga memiliki perpustakaan yang cukup baik di Kebun Raya. Namun, informasi lebih lanjut mengenai koleksi, manajemen, dan akses publik perpustakaan ini tidak banyak diungkapkan. Hal ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran perpustakaan ini dalam mendukung penelitian ilmiah dan pendidikan di Buitenzorg.

Perpustakaan Umum di Batavia

Di Batavia, terdapat Perpustakaan Umum yang didirikan pada tahun 1861 oleh Lodge Vrijmetselaars "Ster in het Oosten." Perpustakaan ini dikelola oleh lima anggota lodge yang dipilih melalui pertemuan lodge, serta dibantu oleh seorang pustakawan yang digaji. Jumlah koleksi di perpustakaan ini mencapai sekitar 10.000 judul, terdiri dari 7.000 buku dalam bahasa Belanda, 2.000 buku dalam bahasa Prancis, 700 buku dalam bahasa Inggris, dan 300 buku dalam bahasa Jerman. Menariknya, tidak ada karya yang tersedia dalam bahasa-bahasa Hindia.

Perpustakaan ini tidak memiliki ruang baca, yang mencerminkan kesulitan untuk membuka ruang baca umum di Hindia akibat iklim dan gaya hidup yang tidak mendukung. Sebagai alternatif, Perpustakaan Umum Batavia mendukung program "trommel bacaan" yang diinisiasi oleh Asosiasi Belanda. Trommel ini diedarkan di kalangan Indo-Eropa dengan biaya f0,50 per bulan, dengan buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan secara gratis. Operasional perpustakaan disesuaikan dengan kondisi kehidupan di Hindia, yakni dari pukul 07:00 hingga 09:30 pagi dan dari pukul 16:00 hingga 17:30 sore. Sebagian besar pengguna perpustakaan ini adalah orang Eropa yang tidak memiliki atau tidak mampu membeli *trommel* bacaan. Dari sekitar 300 pembaca, tidak ada yang berasal dari kalangan pribumi, meskipun terdapat beberapa orang Cina. Upaya untuk memberikan buku gratis kepada tentara akhirnya dihentikan karena buku-buku yang dikembalikan sering kali dalam kondisi yang sangat buruk.

Perpustakaan Baca Katolik di Batavia

Selain Perpustakaan Umum, Batavia juga memiliki Perpustakaan Baca Katolik yang menyediakan akses literatur untuk masyarakat setempat. Perpustakaan ini buka setiap hari kerja dari pukul 09:00 hingga 11:00 pagi dan dari pukul 16:00 hingga 20:00 malam, serta pada hari Minggu dan hari libur dari pukul 08:00 hingga 10:00 pagi dan dari pukul 16:00 hingga 20:00 malam. Dengan biaya berlangganan sebesar f0,50 per bulan, anggota perpustakaan dapat meminjam satu buku per minggu. Jika berlangganan ganda, anggota dapat meminjam dua buku sekaligus. Buku-buku hanya boleh dipinjam selama 14 hari, dan koleksi perpustakaan ini mencakup sekitar 2.000 buku dalam bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris.

Perpustakaan di Bandung

Perpustakaan di Bandung mulai beroperasi pada 16 Oktober 1891, berkat sumbangan buku dari warga lokal. Awalnya, koleksinya terdiri dari sekitar 250 buku. Seiring waktu, perpustakaan ini berkembang menjadi memiliki sekitar 3.000 buku, didukung oleh Lodge St. Jan. Perpustakaan umum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa yang tidak mampu membayar biaya langganan asosiasi baca. Beberapa warga, termasuk Dr. Pool (pendeta), J. Bouwens (kepala bagian kedua Kereta Api Negara), J. Spaarwater (insinyur), W. Veer (pensiunan pengawas pos), dan B.J. van Haastrecht, memutuskan untuk mendirikan perpustakaan dengan biaya langganan rendah setelah mengumpulkan sekitar f100 melalui undangan kepada warga. Dana tersebut digunakan untuk membeli novel dan mendapatkan sumbangan buku, dan perpustakaan awalnya beroperasi dari kamar kecil di kantor Veer. Respon masyarakat sangat positif, dengan 50 hingga 60 buku dipinjamkan setiap minggu pada biaya 6 sen per buku. Dana yang terkumpul, setelah mengurangi biaya operasional, digunakan untuk memperluas perpustakaan, yang kemudian pindah ke ruang sekolah pertanian yang jarang digunakan.

Ketika perpindahan tempat menjadi masalah akibat mobilitas pegawai Hindia, perpustakaan akhirnya ditempatkan di bawah perlindungan Lodge St. Jan. Perpustakaan ini buka setiap Sabtu malam dari pukul 6 hingga 8 malam. Biaya peminjaman adalah 5 sen per buku per minggu, atau biaya langganan f0,50 hingga f1 per bulan, yang memungkinkan peminjam mengambil 2 hingga 6 buku per minggu. Perpustakaan ini adalah anggota asosiasi baca dengan biaya langganan f5 per bulan. Mereka tidak mendapatkan trommel bacaan, tetapi menerima novel terbaru dengan biaya tahunan f60. Koleksi perpustakaan mencakup sekitar 3.000 novel dan lebih dari 300 buku ilmiah, perjalanan, dan karya lain, menyediakan berbagai pilihan untuk penggunaannya. Pengguna tetapnya termasuk pegawai negeri, pensiunan, administrator, dan karyawan perkebunan, dengan sekitar 250 hingga 300 buku dipinjamkan setiap minggu. Tidak ada ruang baca di perpustakaan ini, dan sebagian besar pengguna lebih memilih membaca di rumah, sering kali mengirimkan pembantu mereka untuk mengambil buku.

Perpustakaan "De Bruyn Kops" di Semarang

Perpustakaan "De Bruyn Kops" didirikan pada tahun 1886 oleh G.F. de Bruyn Kops di Batavia. Tuan J. L. De Bruyn Kops, merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kepala editor 'De Economist', dan atas usulan Profesor Neumann Spallart, De Bruyn Kops pernah pula ditunjuk sebagai anggota 'Institut Internasional untuk Statistik', yang didirikan tahun 1887 (Rotterdam Newspaper, 1886). Kemudian waktu perpustakaan ini akan dipindahkan ke Semarang dan dikelola oleh HBS (Hogere Burgerschool). Informasi tentang pemindahan perpustakaan tersebut termut dalam Bat. Nwbl., perpustakaan De Bruyn. Ditulis bahwa perpustakaan milik Tuan De Bruyn Kops adalah salah satu fasilitas yang hanya bermanfaat bagi segelintir orang, yaitu mereka yang sedang belajar. Dan itu hanya jika ada sejumlah besar jurnal yang tersedia dan secara teratur diperbarui. Namun, dengan fasilitas bacaan yang disebutkan, hal ini tidak terjadi. Sejak tahun 1881, tidak ada satu pun jurnal yang diperbarui, tidak ada karya baru yang dibeli, dan seluruh koleksi telah mengalami penurunan nilai yang signifikan. Selain itu, setidaknya 50% dari bacaan yang ada di perpustakaan dapat dianggap tidak cukup berharga lagi (Java-bode: news, trade and advertising paper for the Dutch East Indies, 1886), (The Fatherland, 1903b).

Perpustakaan ini memiliki koleksi sekitar 5.000 buku yang mencakup berbagai bidang pengetahuan seperti sastra, sejarah, arkeologi, geografi, matematika, fisika, agama, sains, dan ekonomi. Awalnya, perpustakaan ini dimiliki oleh asosiasi di Batavia, tetapi karena sudah ada beberapa perpustakaan baik di sana, asosiasi tersebut memutuskan bahwa perpustakaan ini akan lebih bermanfaat jika dipindahkan ke Semarang. Di Semarang, perpustakaan ini dikelola oleh asosiasi setempat dengan nama "De Bruyn Kops". Namun, karena jumlah anggota asosiasi yang menurun,

perpustakaan ini terpaksa dilikuidasi dan diserahkan kepada HBS dengan syarat bahwa masyarakat dapat meminjam buku-bukunya. Namun, untuk mengintegrasikan koleksi tersebut, diperlukan beberapa langkah. Koleksi harus dipilah, dilengkapi jika perlu, dan dikatalogkan. Selain itu, seorang pengurus yang memadai harus diangkat untuk merawat koleksi ini. Biaya untuk pengaturan dan katalogisasi diperkirakan sebesar f3000, sementara f7000 diperlukan untuk membeli buku tambahan. Pengeluaran bulanan untuk pengurus dan perawatan diperkirakan sekitar f45. Proposal ini dikirim oleh C. V. T. dengan rekomendasi positif kepada direktur O. E. dan N. Namun, dengan mempertimbangkan dana yang diminta, direktur meragukan apakah pemerintah akan menerima hadiah tersebut.

Pada Juni 1903, pengurus perpustakaan yang sedang dalam proses likuidasi menawarkan seluruh asetnya kepada HBS Semarang. Direktur saat itu, Mr. Imyten, menyambut baik tawaran tersebut dan mengusulkan agar sumbangan itu diterima dan digabungkan dengan perpustakaan sekolah. Proposal ini mencakup biaya pengaturan dan katalogisasi sebesar f3.000 dan f7.000 untuk pembelian buku tambahan. Biaya bulanan untuk seorang penjaga perpustakaan ditetapkan sebesar f45. Meskipun proposal tersebut disertai rekomendasi positif dari komisi, ada keraguan mengenai persetujuan pemerintah karena jumlah biaya yang diminta. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, beberapa guru setuju untuk mengatur dan mengkatalogkan perpustakaan dengan biaya yang lebih rendah, yaitu f1.400, dengan jaminan bahwa jumlah biaya untuk melengkapi perpustakaan akan ditinjau kembali setelah inventarisasi. Namun, pemerintah tampaknya tidak tertarik dan akhirnya menolak sumbangan tersebut (The Locomotive, 1903a).

Pergantian dari kualitas ke kuantitas ini berakhir dengan penurunan kualitas, dan saat ini jumlah anggota sangat sedikit sehingga tidak ada buku baru atau lanjutan yang dapat dibeli (The Locomotive, 1903b). Secara keseluruhan, Perpustakaan "De Bruyn Kops" di Semarang merupakan contoh penting dari usaha untuk menyediakan akses ke sumber informasi yang beragam dan mendukung pendidikan di wilayah tersebut, meskipun mengalami tantangan dalam pengelolaannya dan penyerahan aset (The Fatherland, 1903a).

Perpustakaan di Malang

Di Malang, terdapat tiga perpustakaan yang terletak di dalam kompleks Militaire Tehuis, yaitu: perpustakaan militer, perpustakaan rakyat yang didirikan oleh lodge lokal pada tahun 1903, dan perpustakaan khusus untuk literatur pertanian. Perpustakaan militer di Malang memiliki koleksi lebih dari 1.230 buku dalam bahasa Belanda, Prancis, dan Jerman, yang dapat diakses oleh anggota militer. Perpustakaan ini berfungsi sebagai sumber referensi dan bacaan bagi personel militer di wilayah tersebut.

Perpustakaan kedua adalah Perpustakaan Umum yang didirikan pada 1 Januari 1903 oleh lodge lokal. Perpustakaan ini memiliki koleksi sekitar 3.000 buku dan sangat aktif, dengan peminjaman mencapai sekitar 530 buku setiap bulan. Perpustakaan ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 12 siang, menyediakan akses yang luas kepada masyarakat setempat. Perpustakaan ketiga adalah perpustakaan khusus pertanian yang berfokus pada literatur mengenai berbagai teknik budidaya pertanian. Meskipun relatif baru, perpustakaan ini menyediakan informasi penting untuk para profesional di bidang pertanian.

Tidak ada perpustakaan di Malang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah; semua bergantung pada kedermawanan masyarakat dan dukungan lokal. Anggaran yang ada hanya mencakup pembelian dan pengikatan buku untuk perpustakaan Departemen Pertanian, dengan gaji pustakawan sebesar f1.200. Secara keseluruhan, perpustakaan-perpustakaan di Malang menunjukkan komitmen untuk menyediakan sumber daya informasi yang bermanfaat bagi berbagai sektor, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar perpustakaan di Hindia Belanda mendapatkan pengakuan setara dengan lembaga pendidikan formal.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Perpustakaan di Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda memainkan peran penting dalam pendirian dan pengelolaan perpustakaan sebagai bagian dari strategi kolonial untuk mendukung pendidikan dan penyebaran budaya. Sesuai dengan prinsip "penyebaran pengetahuan dan budaya," perpustakaan pada masa itu dipandang sebagai alat pencerahan yang bertujuan memberikan akses ke informasi dan materi pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Wayne Bivens-Tatum (2012). Fungsi utama perpustakaan adalah memperkuat pengaruh budaya Belanda di wilayah koloni, sekaligus mempromosikan bahasa dan sastra Belanda kepada masyarakat Indo-Eropa dan pribumi (Statuten der Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 1901).

Namun, dalam implementasinya, pemerintah juga menghadapi tantangan. Rendahnya tingkat minat masyarakat terhadap perpustakaan mencerminkan masalah yang lebih luas terkait efisiensi pengelolaan dan relevansi koleksi perpustakaan, sebagaimana juga diamati di Belanda sendiri. Selain itu, perpustakaan kolonial sering kali digunakan sebagai instrumen dominasi budaya, menggantikan tradisi lisan lokal dengan sistem pengetahuan tertulis yang dianggap lebih "unggul" (Mutonga & Okune, 2022; Chiu et al., 2021). Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga simbol hierarki kekuasaan kolonial.

Perkembangan Perpustakaan di Hindia Belanda (1887–1914)

Pada periode 1887 hingga 1914, perpustakaan di Hindia Belanda mengalami perkembangan signifikan sebagai bagian dari upaya kolonial untuk membentuk masyarakat yang lebih terdidik dan sesuai dengan karakter Belanda. Perpustakaan didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan penguasaan bahasa dan budaya Belanda, serta merangsang minat terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (Statuten der Groep Nederlandsch-Indië, 1901). Dalam konteks ini, perpustakaan menjadi bagian dari misi besar "Nederlandsch-Indië" yang berupaya mendukung pendidikan formal, terutama bagi kaum Indo-Eropa. Namun, meskipun banyak perpustakaan didirikan, minat masyarakat (khususnya kalangan pribumi) terhadap layanan ini cenderung masih rendah. Sebagaimana dikemukakan juga dalam sebuah penelitian, bahwa efisiensi perpustakaan sering dipengaruhi oleh model pengelolaannya, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta (Kim et al., 2020). Dalam kasus Perpustakaan di Hindia Belanda, pemerintah pusat memiliki kendali signifikan, tetapi ketika itu dijalankan tanpa kerangka konseptual modern seperti yang umumnya diterapkan diberbagai perpustakaan saat ini, sehingga kebanyakan perpustakaan yang berdiri etika itu gagal mencapai potensi maksimalnya.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah kolonial berhasil mendirikan berbagai perpustakaan dan mendukung penyebaran pengetahuan melalui media tertulis, berdasarkan berbagai deskripsi dan pembahasan pengelolaan perpustakaan di Hindia Belanda bahwa ditemukan berbagai persoalan dan tantangan seperti terkait pendanaan, minimnya tenaga ahli, dan perbedaan signifikan dukungan pemerintah dibandingkan dengan Belanda pada waktu yang sama. Hal ini memberikan perspektif tentang bagaimana faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi perkembangan literasi dan akses informasi di masyarakat kolonial.

Pembelajaran dari Pendirian Perpustakaan Masa Hindia Belanda

Dengan mempelajari sejarah ini, harapannya kita atau generasi sekarang ini dapat mengambil pelajaran dan memahami tentang pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, sebagai dasar untuk merancang kebijakan literasi yang lebih baik. Selain itu, refleksi atas tantangan masa lalu sebagaimana telah diuraikan di atas juga bisa memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan yang profesional dan berkelanjutan dalam mendukung masyarakat yang lebih melek informasi di era digital.

Perpustakaan di Hindia Belanda tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyedia akses informasi tetapi juga berpotensi menjadi alat kontrol budaya oleh pemerintah kolonial. Dengan koleksi yang sebagian besar terdiri dari literatur Belanda dan Eropa, perpustakaan lebih diarahkan untuk melayani kebutuhan kaum elite kolonial dan kelompok terdidik yang mendukung sistem kolonial. Hal ini membatasi akses terhadap literatur lokal atau tulisan yang mendukung budaya dan pemikiran pribumi. Dalam konteks ini, perpustakaan dapat dilihat sebagai instrumen hegemoni budaya, di mana pemerintah kolonial mengontrol narasi sejarah dan ilmu pengetahuan yang diakses oleh masyarakat. Akibatnya, budaya lokal cenderung terpinggirkan, dan masyarakat pribumi tidak memiliki ruang yang cukup untuk memperkuat literasi berbasis kearifan lokal. Dampaknya, muncul ketimpangan dalam akses informasi yang memperkuat dominasi budaya kolonial atas budaya setempat, sekaligus memperlambat pertumbuhan literasi yang relevan bagi masyarakat pribumi.

Dari studi ini kiranya akan relevan bagi kita untuk memahami bagaimana warisan kolonial terus memengaruhi kebijakan perpustakaan di Indonesia saat ini. Sebagai contoh, struktur pengelolaan perpustakaan modern di Indonesia, termasuk hierarki administrasi, penekanan pada literatur asing, dan keterbatasan pendanaan, dapat ditelusuri kembali ke era kolonial. Meskipun sudah ada upaya untuk memperkuat keberadaan literatur lokal dan pengembangan perpustakaan berbasis komunitas, tantangan seperti kekurangan pustakawan terlatih dan anggaran yang terbatas masih mencerminkan masalah yang serupa dengan masa lalu.

Pemahaman tentang sejarah perpustakaan di Hindia Belanda dapat mendorong pembuat kebijakan masa kini untuk mengevaluasi pendekatan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Misalnya, perpustakaan dapat difokuskan untuk mendukung literasi lokal, melestarikan manuskrip dan dokumen sejarah Indonesia, serta memberikan akses yang lebih luas kepada komunitas yang terpinggirkan. Dengan belajar dari keterbatasan sistem perpustakaan kolonial, Indonesia dapat mengembangkan perpustakaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan masa kini dapat juga bertransformasi menjadi pusat inklusi, literasi, dan pelestarian budaya yang lebih adil dan berdaya guna.

Kesimpulan

Pemerintah Hindia Belanda memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan perpustakaan, walaupun keterlibatan secara langsungnya ketika itu sangat terbatas. Perkembangan perpustakaan antara tahun 1887 dan 1914 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah dan jenis perpustakaan, namun tantangan dalam pendanaan dan dukungan masyarakat merupakan hal utama. Secara keseluruhan, meskipun ada inisiatif dan dukungan dari kelompok seperti Algemeen Nederlandsch Verbond, perpustakaan-perpustakaan di Hindia Belanda pada masa itu ternyata belum bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal terhadap perpustakaan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa ternyata dimasa tersebut juga ada kebutuhan untuk perbaikan dan dukungan lebih lanjut dalam upaya memajukan pendidikan dan budaya di wilayah Hindia Belanda.

Secara keseluruhan, meskipun ada inisiatif dan dukungan dari kelompok seperti Algemeen Nederlandsch Verbond, perpustakaan-perpustakaan di Hindia Belanda pada masa itu ternyata menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan, yang sekaligus mencerminkan kebutuhan untuk perbaikan dan dukungan lebih lanjut dalam upaya memajukan pendidikan dan budaya di wilayah Hindia Belanda. Secara umum kondisi perpustakaan di Belanda dan Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menunjukkan perbedaan mencolok dalam perkembangan dan dukungan pemerintah terhadap institusi. Di Belanda, pembentukan Persatuan Ruang Baca Umum menunjukkan kemajuan signifikan dalam manajemen dan dukungan pemerintah terhadap perpustakaan, sementara di Hindia Belanda, perpustakaan masih bergantung pada inisiatif lokal

dengan dukungan pemerintah yang terbatas dan sumber daya yang minim. Bahwa kemudian itu menjadi persoalan yang semakin memperparah kondisi perkembangan dan penyelenggaraan perpustakaan di Hindia Belanda awal abad ke-20.

Daftar Pustaka

- Abnhemsche Courant. (1909, April 24). Tweede blad. Kunsten, letteren, wetenschappen. Laatste berichten. Wekelijksch overzicht der faillissementen vereeniging openbare leeszaalen in nederland.
- Chiu, A., Ettarh, F. M., & Ferretti, J. A. (2021). Not the shark, but the water: how neutrality and vocational awe intertwine to uphold white supremacy. Dalam S. Y. Leung & J. R. López-McKnight (Ed.), *Knowledge Justice* (hlm. 49–72). The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/11969.003.0005>
- CILIP London (Direktur). (2020). Cilip london critlib talks: decolonisation and diversity of sources [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=jVEt2mmXSaw> (Accessed: 12/4/2022)
- Clayton, P., & Gorman, G. E. (2001). *Managing information services: a practical guide*. Facet Publishing.
- Dutch East Indies. (1909). *Regeerings almanak voor nederlandsch—indie 1909*. Landsdrukkerij.
- Elizabeth B. Fitzpatrick. (2008). The public library as instrument of colonialism: the case of the netherlands east indies. *Libraries & the Cultural Record*, 43(3), 270–285.
<https://doi.org/10.1353/lac.0.0034>
- Gorman, G. E., & Clayton, P. (2005). *The role of the library in the 21st century: past, present, and future*. Facet Publishing.
- Gunapala, M., Montague, A., Reynolds, S., & Vo-Tran, H. (2020). Managing change in university libraries in the 21st century: an australian perspective. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 69(2), 191–214. <https://doi.org/10.1080/24750158.2020.1756598>
- Heldt, B.H. (2012). *Algemeen nederlandsch werklieden-verbond, 1871-1896*. Nabu Press.
- Java-bode: News, Trade and Advertising Paper for the Dutch East Indies. (1886, Oktober 13). The reading facility de bruyn kops. Tanning.
- Kim, C., Kim, H., & Choi, K. (2020). Efficiency analysis of public library services based on establishing entity and outsourcing. *Sustainability*, 12(21), 9205.
<https://doi.org/10.3390/su12219205>
- Mutonga, S., & Okune, A. (2022). Re-membering kenya: building library infrastructures as decolonial practice. Dalam J. Crilly & R. Everitt (Ed.), *Narrative Expansions* (1 ed., hlm. 189–212). Facet. <https://doi.org/10.29085/9781783304998.015>

Nieuwe Tilburgsche Courant Tilburgsch Dagblad. (1908, Juh). Federatie der 5 r. K. Diocesane bonden. Een Flink Besluit.

ODonnell, P., & Anderson, L. (2022). The university library: places for possibility. *New review of academic librarianship*, 28(3), 232–255. <https://doi.org/10.1080/13614533.2021.1906718>

Orna Farrell & James Brunton. (2016, Oktober). Using online primary sources to foster historical thinking. Rome home conference. Conference: OOFHEC 2016, Rome.

Rotterdam Newspaper. (1886, Oktober 2). Binnenland. AW Sijthoff.

Tally, B., & Goldenberg, L. B. (2005). Fostering historical thinking with digitized primary sources. *Journal of research on technology in education*, 38(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/15391523.2005.10782447>

The Fatherland. (1903a, Januari 12). Bibliotheek-de bruyn kops. M. Nijhoff [etc.] CA van Reyn.

The Fatherland. (1903b, Oktober 9). The reading facility de bruyn kops. M. Nijhoff [etc.] CA van Reyn.

The Locomotive. (1903a, Mei 8). Bibliotheek-de bruyn kops. De Groot, Kolff & Co.

The Locomotive. (1903b, Oktober 29). De bruyn kops library. De Groot, Kolff & Co. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001625073:mpeg21:pdf>

Wayne Bivens-Tatum. (2012). *Libraries and the enlightenment*. Library Juice Press.